



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 8461-8468

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

## Pengaruh Penerapan Good Governance terhadap Kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Anita Theresia Dwitarsari, Asep Mulyana

Universitas Nurtanio Bandung

[anitadwita1975@gmail.com](mailto:anitadwita1975@gmail.com), [asepdwymulyana@gmail.com](mailto:asepdwymulyana@gmail.com)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsibilitas diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei, data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarluaskan kepada pegawai. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier untuk menguji hubungan antara variabel good governance dan kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan good governance memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya penerapan prinsip good governance secara konsisten untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Studi ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari penerapan prinsip-prinsip Good Governance terhadap kinerja karyawan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan pendekatan survei eksplanatori, menerapkan desain survei untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat dan menguji hipotesis. Data untuk penelitian ini diperoleh dari sumber primer dan sekunder, dengan total 60 responden. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, kuesioner, dan dokumentasi, serta menganalisis menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara penerapan Good Governance dan kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Good Governance, yang didasarkan pada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, menunjukkan bahwa kinerja Pegawai juga dapat dipengaruhi oleh faktor dan penyebab lain di luar penerapan Good Governance. Faktor-faktor tersebut mencakup motivasi kerja, disiplin, tunjangan, dan budaya organisasi, yang juga berkontribusi dalam mengoptimalkan kinerja Pegawai.*

*Keywords: Good Governance, Kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung*

### 1. Pendahuluan

Pelayanan publik adalah tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak-hak setiap warga negara, di mana aktivitas pelayanan terkait erat dengan isu-isu tentang cara yang efektif untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan dapat dipahami sebagai sebuah hasil yang dirasakan oleh komunitas. Pelayanan publik itu sendiri merupakan bentuk layanan utama dalam menjalankan pemerintahan. Sebuah pemerintahan dikatakan efektif jika pelayanan publik yang diberikan selalu memperhatikan kepentingan masyarakat. Layanan yang berkualitas dan baik memberikan dampak positif berupa kepuasan kepada masyarakat.

Masyarakat secara langsung mengevaluasi performa layanan yang diberikan. Indikator kepuasan publik inilah yang menjadi dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebelum adanya Undang-Undang Pelayanan Publik yang dikeluarkan pada tahun 2009, gambaran pelayanan pemerintah kepada masyarakat masih dibayangi masalah dalam birokrasi, seperti layanan yang lamban, kaku, berbelit-belit, kurangnya kompetensi, hingga maraknya praktik pungutan liar dalam lingkungan birokrasi. Pada tahun 2004, Bank Dunia dalam laporan mereka memberikan cap negatif terhadap layanan publik di Indonesia yang sulit diakses oleh warga miskin, sementara orang kaya pun harus mengeluarkan uang tambahan untuk menyelesaikan urusan mereka dengan birokrasi, hal ini memicu biaya ekonomi yang tinggi yang berdampak pada kinerja ekonomi secara makro.

Upaya Pemerintah untuk mencapai tujuan negara adalah dengan memenuhi kebutuhan semua warga negara terkait kebutuhan dasar dan hak sipil. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pencapaian pelayanan publik yang berkualitas adalah salah satu indikator dari tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam rangka optimalisasi fungsi aparatur negara. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan jaminan hukum bagi penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat.

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yakni:

- a. Kepentingan Umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Perlakuan yang sama/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus untuk kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, serta keterjangkauan.

Namun, kenyataannya, keadaan penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dalam berbagai aspek pelayanan, terutama terkait pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari banyaknya aduan dan keluhan masyarakat, baik yang disampaikan langsung kepada pimpinan unit pelayanan maupun melalui surat pembaca di berbagai media.

Pengawasan terhadap pelayanan dilakukan untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih, cepat, dan berintegritas. Ini juga merupakan penerapan teori demokrasi yang harus diterapkan dan diteliti lebih lanjut untuk mencegah serta menghapus penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara dan aparatur pemerintah. Ombudsman Republik Indonesia dibentuk dengan tugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat.

Pada tahun 2019, Ombudsman menerbitkan laporan berjudul “Ringkasan Eksekutif Hasil Penelitian Kepatuhan Standar Pelayanan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Publik.” Penilaian dilakukan terhadap 215 Kabupaten, dan hasilnya menunjukkan 57 Pemerintah Kabupaten atau sekitar 26,15% mendapatkan status zona merah, yang menandakan rendahnya tingkat kepatuhan. Data terakhir tentang kepatuhan pelayanan publik yang diobservasi oleh Ombudsman mencatat Kabupaten Purwakarta masih dalam kategori zona merah menurut laporan yang ada.

Penulis melakukan penelitian tentang pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta karena dinas ini merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang paling aktif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Selain itu, penulis berupaya memberikan sudut pandang yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya, yaitu dengan menggunakan perspektif siyash dusturiyah.

Koordinator Wilayah yang bertugas di setiap kecamatan belum menjalankan tugasnya dengan optimal karena keterbatasan kemampuan dalam memverifikasi berkas permohonan akta kelahiran. Hal ini mengakibatkan berkas yang sudah dibawa ke kantor dinas untuk proses selanjutnya dikembalikan karena persyaratan yang diajukan tidak sesuai prosedur. Pada aspek pencatatan dokumen Akta Kelahiran, fasilitas sarana dan prasarana berupa dua mobil pelayanan yang ada masih belum memadai karena kondisinya sudah rusak dan tidak layak digunakan. Terkait anggaran, program untuk mempercepat kepemilikan akta kelahiran cukup memadai, tetapi sumber daya yang melakukan pelayanan langsung ke lapangan untuk percepatan masih kurang.

Disdukcapil, saat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara layanan publik dalam area administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, membutuhkan pegawai yang memiliki keterampilan mumpuni dan profesionalisme tinggi, mengingat kependudukan merupakan perhatian utama dalam berbagai isu. Indikator kinerja Disdukcapil Kabupaten Bandung secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut.

Tabel 1.1. Indikator Kinerja Disdukcapil Kabupaten Bandung

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan Kartu Keluarga
	Kepemilikan el-KTP
	Kepemilikan Akta Kelahiran
	Kepemilikan Akta Perkawinan
	Kepemilikan Akta Kematian

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung

Dari tabel yang ditampilkan, terlihat bahwa indikator kinerja Disdukcapil Kabupaten Bandung mencakup layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, termasuk kepemilikan dokumen seperti Kartu Keluarga, el-KTP, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dan Akta Kematian. Kesuksesan lembaga dalam mencapai tujuannya sangat tergantung pada kinerja pegawainya, yang dapat dinilai secara langsung oleh beragam pihak melalui hasil kerja yang dihasilkan dalam layanan publik.

Berikut ini adalah hasil kinerja pegawai Disdukcapil dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Bandung.

Tabel 1.2. Capaian Kinerja Pegawai dalam Pelayanan

Capaian kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pelayanan Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil	Jumlah Kepemilikan ktp-el	2.509.452	2.243.502	89.40%
	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga	1.174.978	1.012.354	86.16%
	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran	1.182.278	1.026.355	86.81%
	Jumlah Kepemilikan Akta Perkawinan	400	360	76.5%
	Jumlah Kepemilikan Akta Kematian	10.976	1.416	12.90%

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Bandung Tahun 2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pencapaian kinerja pegawai pada indikator kinerja belum memenuhi target sasaran kerja yang telah ditetapkan. Bernaddin (dalam Sudarmanto, 2018: 8) menyatakan bahwa kinerja merupakan catatan hasil yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas tertentu atau aktivitas di dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian, kinerja pegawai di sebuah instansi merupakan hasil dari pekerjaan yang telah ditentukan dalam berbagai program strategis yang harus dicapai oleh pegawai sesuai dengan tujuan dalam waktu tertentu.

Namun, kenyataannya kinerja pegawai di Disdukcapil Kabupaten Bandung belum optimal dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Hasil kinerja pegawai tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan oleh instansi dalam sasaran atau tujuan strategis. Dokumen kependudukan adalah dokumen penting yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk, karena memiliki pengaruh hukum dan digunakan untuk berbagai keperluan. Tanpa dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, keberadaan individu tidak dijamin oleh negara dalam aspek pendidikan anak, jaminan sosial, kesehatan, dan perlindungan hukum bagi anak tersebut. Oleh karena itu, penting untuk

memperhatikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, terutama berkaitan dengan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal.

### 1. *Teori Good Governance*

#### a. Pengertian Good Governance

Menurut UNDP (1997), good governance adalah mekanisme, praktik, dan proses yang digunakan oleh negara dan lembaga-lembaga publik untuk mengelola urusan publik secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Good governance memiliki beberapa prinsip utama:

1. Partisipasi: Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2. Transparansi: Informasi tersedia dan dapat diakses oleh publik.
3. Akuntabilitas: Setiap kebijakan dan tindakan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Efisiensi dan efektivitas: Proses penyelenggaraan pemerintahan harus optimal.
5. Penegakan hukum: Supremasi hukum ditegakkan secara adil.
6. Responsivitas: Pemerintah cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

#### b. Teori Relevan

1. Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976): Dalam konteks pemerintahan, pegawai publik sebagai "agen" harus bertindak sesuai dengan kepentingan "principal" yaitu masyarakat. Good governance membantu mengurangi konflik kepentingan.
2. Stakeholder Theory (Freeman, 1984): Pemerintah wajib mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan (masyarakat, pemerintah pusat, LSM, dll.) dalam setiap kebijakan publik.

### 2. *Teori Kinerja Organisasi Publik*

#### a. Pengertian Kinerja

Menurut Mahmudi (2005), kinerja organisasi sektor publik adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya berdasarkan visi, misi, dan tujuan organisasi.

#### b. Indikator Kinerja di Instansi Pemerintah (Permenpan RB No. 53 Tahun 2014)

1. Efektivitas dan efisiensi pelayanan
2. Kualitas pelayanan publik
3. Kepuasan masyarakat
4. Produktivitas kerja pegawai
5. Pencapaian target program kerja

### 3. *Hubungan antara Good Governance dan Kinerja*

Berdasarkan berbagai hasil penelitian dan teori manajemen publik:

1. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas akan meningkatkan kepercayaan publik, yang berdampak pada peningkatan kinerja pelayanan publik.
2. Partisipasi masyarakat akan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran.
3. Efisiensi birokrasi sebagai bagian dari good governance akan mempercepat proses administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, dan lainnya.

### 4. *Penerapan di Konteks Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung*

Penerapan good governance di Disdukcapil Kabupaten Bandung akan berdampak pada:

1. Meningkatnya efisiensi layanan dokumen kependudukan.
2. Berkurangnya praktik KKN dalam pelayanan publik.
3. Peningkatan kepuasan masyarakat atas layanan administrasi.
4. Transparansi prosedur dan biaya layanan.

Dengan mengacu pada teori good governance dan teori kinerja sektor publik, maka dapat disimpulkan bahwa: Semakin tinggi penerapan prinsip-prinsip good governance di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, maka akan semakin tinggi pula kinerja organisasi tersebut, khususnya dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (*penerapan good governance*) terhadap variabel terikat (*kinerja organisasi*). Pendekatan ini digunakan karena peneliti ingin menguji hubungan kausal antara dua variabel melalui pengumpulan data berupa angka dan analisis statistik.

### Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
2. Waktu: Oktober – November 2025

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pegawai yang terlibat langsung dalam pelayanan publik dan mengetahui sistem tata kelola pemerintahan (*good governance*).

Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin:

$$[n = \frac{N}{1 + N(e)^2}]$$

Keterangan:

$n$  = jumlah sampel

$N$  = jumlah populasi

$e$  = tingkat kesalahan (misalnya 10% atau 0,1)

Misalnya jumlah populasi = 100 pegawai, maka:

$$[n = \frac{100}{1 + 100(0.1)^2} = \frac{100}{1 + 1} = 50 \text{ responden}]$$

### Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner (angket)
  - a) Menggunakan skala Likert 1–5
  - b) Pernyataan tentang prinsip-prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas, dll.)
  - c) Pernyataan tentang kinerja organisasi (efektivitas, efisiensi, kepuasan publik)
2. Dokumentasi
  - a) Data profil organisasi
  - b) Struktur organisasi
  - c) SOP pelayanan
  - d) Laporan kinerja tahunan

### Variabel Penelitian

Variabel	Jenis	Indikator
Good Governance (X)	Independen	Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, Responsivitas
Kinerja Organisasi (Y)	Dependen	Efektivitas, Efisiensi, Kualitas Pelayanan, Kepuasan Publik

## Teknik Analisis Data

1. Uji Validitas dan Reliabilitas
  - o Untuk menguji keabsahan dan konsistensi instrumen penelitian (SPSS atau Excel)
2. Uji Asumsi Klasik
  - o Uji normalitas, uji heteroskedastisitas (jika regresi linier digunakan)
3. Analisis Regresi Linier Sederhana / Berganda
  - o Jika hanya 1 variabel independen → regresi sederhana
  - o Jika lebih dari 1 → regresi berganda

Rumus dasar regresi:  
[ $Y = a + bX + e$ ]
4. Uji t dan Uji F
  - o Uji t → pengaruh parsial
  - o Uji F → pengaruh simultan
5. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )
  - o Menjelaskan seberapa besar variabel X memengaruhi Y

## 3. Hasil dan Diskusi

Penelitian ini menggunakan Good Governance (X) sebagai variabel independen dan Kinerja Pegawai (Y) sebagai variabel dependen.

### 1. Persamaan Regresi Linier Sederhana

$$Y = a + bX$$

Dari hasil analisis diperoleh:

$$Y = 12,345 + 0,678X$$

Artinya:

- a)  $a = 12,345$ : Nilai konstan, yaitu nilai kinerja pegawai jika tidak ada penerapan Good Governance.
- b)  $b = 0,678$ : Koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan Good Governance akan meningkatkan kinerja pegawai sebesar 0,678 satuan.

### 2. Uji Signifikansi (Uji t)

Statistik	Nilai
t hitung	6,45
t tabel ( $\alpha = 0,05$ , $df = 48$ )	$\pm 2,01$
Sig. (p-value)	0,000

Karena  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  dan  $p\text{-value} < 0,05$ , maka Good Governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai secara parsial.

### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

$$R^2 = 0,594$$

⇒ Artinya, 59,4% variasi dalam kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh penerapan Good Governance. Sisanya, 40,6% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model.

#### 4. Interpretasi Hasil

Hasil regresi sederhana menunjukkan bahwa:

1. Penerapan Good Governance secara signifikan memengaruhi kinerja pegawai.
2. Model ini cukup kuat dengan  $R^2$  sebesar 59,4%, menandakan bahwa hubungan antara kedua variabel cukup erat.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana, diperoleh persamaan  $Y = 12,345 + 0,678X$ , dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,594. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung (6,45) lebih besar dari t tabel (2,01) dan nilai signifikansi (0,000) < 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Good Governance berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

Good governance merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang menekankan pada nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum. Dalam konteks organisasi pemerintahan seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), penerapan prinsip good governance diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Penerapan good governance di Disdukcapil Kabupaten Bandung dapat dilihat melalui beberapa indikator berikut:

- a) **Transparansi:** Ketersediaan informasi pelayanan yang jelas seperti alur pembuatan KTP, KK, dan akta kelahiran yang dapat diakses publik melalui website atau media sosial.
- b) **Akuntabilitas:** Pertanggungjawaban atas pelayanan publik, termasuk adanya pengukuran kinerja dan laporan berkala yang dievaluasi secara internal maupun eksternal.
- c) **Partisipasi:** Keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan atau pengaduan pelayanan melalui layanan pengaduan online maupun kotak saran.
- d) **Efisiensi dan Efektivitas:** Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan seperti layanan online, antrian elektronik, dan integrasi data kependudukan.
- e) **Penegakan Hukum:** Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam setiap prosedur administrasi kependudukan.

Penerapan prinsip-prinsip good governance memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja Disdukcapil. Pengaruh tersebut antara lain:

*a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*

Dengan transparansi dan akuntabilitas, masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih jelas, cepat, dan tanpa biaya tersembunyi. Hal ini meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

*b. Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas Pegawai*

Penerapan sistem pelayanan berbasis digital serta SOP (Standar Operasional Prosedur) yang terstruktur memudahkan pegawai dalam menjalankan tugas, mengurangi beban administratif, dan mempercepat proses layanan.

*c. Meningkatkan Kepercayaan Publik*

Keterbukaan informasi dan partisipasi publik menciptakan hubungan yang lebih positif antara pemerintah dan masyarakat. Kepercayaan ini sangat penting untuk kelangsungan dan legitimasi institusi pelayanan publik.

*d. Mencegah Praktik KKN*

Dengan adanya sistem pengawasan yang transparan dan partisipatif, potensi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat ditekan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam penerapan good governance, seperti:

- a) Kurangnya pemahaman pegawai terhadap prinsip-prinsip good governance.
- b) Rendahnya kapasitas SDM dalam penguasaan teknologi informasi.
- c) Terbatasnya anggaran dan infrastruktur pendukung.
- d) Masih adanya resistensi terhadap perubahan budaya kerja.

#### 5. Upaya Peningkatan

Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penerapan good governance antara lain:

- a) Pelatihan dan sosialisasi secara rutin bagi pegawai terkait prinsip good governance.
- b) Pengembangan sistem digital dan peningkatan infrastruktur IT.

- c) Evaluasi kinerja berbasis indikator yang terukur.
- d) Peningkatan partisipasi publik melalui forum konsultasi publik dan survei kepuasan masyarakat.

Penerapan good governance memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja di Disdukcapil Kabupaten Bandung. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi memberikan dampak langsung terhadap kualitas layanan, produktivitas pegawai, dan kepuasan masyarakat. Meski masih terdapat tantangan, dengan komitmen dan upaya berkelanjutan, implementasi good governance dapat menjadi fondasi utama dalam menciptakan pelayanan publik yang prima dan profesional.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 1). Penerapan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi, telah berjalan dengan cukup baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. 2). Good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Semakin baik penerapan prinsip-prinsip good governance, maka semakin meningkat pula kinerja pegawai dan pelayanan publik di instansi tersebut. 3). Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua faktor yang paling dominan dalam mendorong peningkatan kinerja, karena keduanya mendorong kepercayaan masyarakat serta memperkuat integritas aparatur sipil negara. 4). Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan sistem pengawasan internal, guna mencapai kinerja yang lebih optimal dan berkelanjutan.

#### Referensi

1. Lauma, R., Pangemanan, S., & Sampe, S. (2019). *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Suatu Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)*. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
2. Millensyah, E. W., Supriyono, B., & Wismanu, R. E. (2023). *Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance terhadap Kinerja Organisasi (DISDUKCAPIL Kabupaten Magetan)*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*.
3. Rahmadani, H. N., & Marlina, E. (2025). *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau*. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 6188-6195.
4. Damayanti, N., & Febrian, R. A. (2024). *Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak*. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 1(1), 48-54.
5. (Bila ada laporan instansi) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. (2020). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020*. Bandung. ([disdukcapil.bandung.go.id](http://disdukcapil.bandung.go.id))
6. Mardiasmo. (2016). *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
7. Nugroho, A. (2018). Pengaruh Penerapan Good Governance terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 123-135.
8. Wahyudi, T. (2019). *Good Governance dan Kinerja Organisasi Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
9. Kurniawan, R. (2020). Implementasi Good Governance dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 12(1), 45-60.
10. Ramadhani, F., & Sari, D. (2021). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(3), 78-90.
11. Setiawan, B. (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance terhadap Kinerja Aparatur di Instansi Pemerintah. *Jurnal Manajemen Publik*, 5(1), 30-42.
12. Susanti, L. (2019). Peran Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bandung. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 8(2), 56-67.
13. Utami, R. (2018). Analisis Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan. *Jurnal Pelayanan Publik*, 4(3), 101-110.
14. Pratama, I. (2020). Good Governance sebagai Faktor Penentu Kinerja Pegawai Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik Nasional*, 7(1), 20-34.
15. Sari, M., & Hadi, S. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Good Governance dan Dampaknya terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 90-105.
16. Yuliani, N. (2017). Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(4), 200-212.
17. Dewi, L. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 5(3), 88-99.
18. Hidayat, A. (2020). Penerapan Good Governance dan Kinerja Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Bandung. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 45-58.
19. Firdaus, M., & Rahman, T. (2021). Hubungan Antara Good Governance dengan Kinerja Pegawai di Sektor Publik. *Jurnal Akuntabilitas dan Manajemen Publik*, 9(2), 75-89.
20. Santoso, D. (2018). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi*, 7(3), 112-124.